

# **BUPATI PEMALANG**

## PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR L TAHUN 2006

### **TENTANG**

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006

## **BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berjalan lancar dan tertib administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang pengelolaan keuangan berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 perlu disesuaikan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Standarisasi Barang/Jasa Harga Pengadaan Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 50);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2000 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 38 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 83).
- 12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 20).

## **MEMUTUSKAN:**

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS Menetapkan: PERATURAN BUPATI PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI **BIAYA** KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN. **STANDARISASI** DAN HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2006.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

 http://jdih.pemalangkab.go.id// http://jdih.pemalangkab.go.id//

## Pasal 4

- (1) Dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat dielakkan maka segala perubahan dan/atau penyimpangan dari yang tertuang dalam standarisasi harus mengajukan izin kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengadaan barang/jasa dilaksanakan.
- (2) Apabila besarnya honorarium melebihi standarisasi yang telah ditetapkan maka honorarium tersebut harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang belum diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pengadaannya menyesuaikan harga pasar yang berlaku dan wajib mendapatkan izin dari Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 2 Januari 2006

R BUPATI PEMALANG

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 2 Januari 2

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMADANG

SAT HARDJANTO Q

CERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN

2006 NOMOR 4